

# **KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENDISTRIBUSIAN RASTRA DI DESA LAMATTI RIAJA KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI**

**Oleh:**

**Abd. Rahman**

**STISIP Muhammadiyah Sinjai**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja pemerintah dalam penyaluran Pembagian Rastra bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: aparat Desa dan Pengeluaran Dana Rastra sebagai variabel bebas serta data masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan dampak yang ditimbulkan ketidak merataannya pembagian Rastra. Dalam penelitian menggunakan metode yakni kualitatif dimana Peneliti langsung terjun kelokasi penelitian untuk melakukan melakukan riset kepada orang yang berperang penting dalam pendistribusian Rastra serta melakukan pengambilan data yang berkaitan dengan pengelolaan Rastra. Kemudian tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pelayanan pemerintah desa dalam pendistribusian Rastra di Desa Lamatti Riaja.

**Kata Kunci: Bantuan Ranstra**

## **PENDAHULUAN**

Dalam upaya mencapai suatu tingkat kesejahteraan di segala bidang dalam suatu negara masih banyak kendala yang tidak hanya terjadi pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan namun terjadi juga pada tingkat desa. Dimana kita ketahui pembangunan disegala bidang terdiri dari dua bentuk yaitu dari pusat ke daerah/top down dan daerah ke pusat/*bottom up*. Jika kita mulai dari tingkat desa maka pembangunan kita mulai dari tingkat yang paling bawah akan tetapi meskipun desa dalam skala kecil tidak menutup kemungkinan begitu banyak kendala untuk mencapai kata sejahtera.

Pemerintahan desa sangat berperan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan suatu desa mengalami ketertinggalan dimana kita ketahui desa identik dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan rendahnya tingkat pendidikan. Pengembangan sumber daya masyarakat desa sangat perlu demi meningkatkan kreatifitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Adapun kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah dalam mengatasi tingkat kemiskinan didesa. Pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi hal tersebut seperti Rastra, bantuan langsung tunai (BLT) dan lain-lain pemerintah desalah yang paling bertanggung jawab dalam pendistribusiannya termasuk di desa Lamatti Riaja. Hal ini yang patut kita ketahui didalam proses

penyaluran yang terkadang tidak tepat sasaran dan memakai sistem kekeluargaan pada aparatur pemerintah desa yang bekerja didalamnya.

Rastra merupakan program bantuan pangan pemerintah pusat namun pemerintah desalah yang bertanggung jawab. Bantuan ini berupa beras 15 kg yang seharusnya di terima masyarakat setiap bulannya akan tetapi sering 2 bulan sekali ataupun lebih baru di terima masyarakat. Lambatnya pendistribusian beras kepada masyarakat desa ini menjadi suatu masalah karna berbeda dengan desa lain. Selain pendistribusian yang lambat proses pendataan masyarakat miskin di desa tidak tepat sasaran dan biasa menggunakan sistem siapa yang dekat dengan pemerintah desa atau aparatur desa itulah yang dapat. Mekanisme pelayanan pemerintah desa yang disoroti dalam pendistribusiannya yang tatkala menimbulkan keresahan atau komplain dalam masyarakat. Selain memberikan pelayanan dasar dan peningkatan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa juga harus memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi baik dalam pembangunan maupun proses dalam pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelayanan pemerintah desa dalam pendistribusian rastra di desa Lamatti Riaja dan faktor penghambat pemerintah desa dalam pendistribusian rastra serta dampak yang ditimbulkan dalam ketidak merataannya pembagian Rastra di desa Lamatti Riaja?

## **TINJAUAN TEORI**

### **1. Kebijakan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Kebijakan publik adalah suatu program yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah yang mengarah pada kepentingan masyarakat yang tentunya melalui proses dan mempunyai hasil. Kebijakan publik menjadi sangat penting yang dibuktikan dengan tidak adanya satu media yang setiap harinya yang tidak membicarakan tentang isu kebijakan. Kebijakan publik selalu menjadi perhatian masyarakat luas karna menyangkut kepentingan orang banyak, berdampak pada masyarakat dan tentunya berimplikasi pada anggaran. Berbicara anggaran tentang kebijakan publik pasti sangat menyedot perhatian. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat yang telah dirancang dan disusun dalam suatu tujuan.

Kesejahteraan adalah rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan.

Menurut Anwar Abbas dalam bukunya yang berjudul *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, "orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam

batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam” Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen Pressmen kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan memaksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya. Menurut Jeremy Bentham, terdapat empat hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu:

- a. Kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan utama yang harus dicapai oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
- b. Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat memilih dan memilah sesuatu yang dapat meningkatkan aspek kebahagiaan dalam melakukan aktifitas ekonomi.
- c. Diberlakukan adanya rumusan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
- d. Diperlukan peranan pemerintah dalam sebagai aparat penegak undang-undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

## **2. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di gambarkan sebagai suatu keadaan dimana penghasilan yang didapat di bawah rata-rata. Kemiskinan secara etimologi berasal dari kata miskin yang mendapat imbuhan ‘ke-an” yang berarti mengubah gaya dari sifat kepada suatu keadaan (kata benda) kata miskin dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1995) berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Dengan demikian kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan yang serba kekurangan sebagai akibat tingkat pendapatan yang rendah.

Kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN (2003) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera diidentikkan dengan kondisi keluarga sebagai berikut:

- a. Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara

minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana.

- b. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: Karena alasan ekonomi/keluarga miskin, artinya keluarga yang menurut kemampuannya lemah dan miskin. Keluarga semacam ini mempunyai sifat yang sama dengan indikator yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang miskin atau sangat miskin dan belum bisa menyediakan keperluan pokoknya dengan baik. Menurut Schiller menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. (Soetrisno, 2001), dan dengan nada yang sama Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Andre Bayu Ala, 1981).

Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatankerja, dan ketrampilan yang memadai.
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- c. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.
- d. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*)
- e. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Penting untuk memikirkan alternatif pendidikan akses penduduk miskin untuk menguasai, memanfaatkan dan mengelolah sumber daya yang tersedia sehingga mereka dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara mandiri. Salah tujuan dari kebijakan publik adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta perluasan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan adalah pemberian rastra untuk

keluarga miskin.

### **3. Program Beras Sejahtera (RASTRA)**

Rastra merupakan salah satu kebijakan yang diadakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dengan tepat. Program Rastra yang dulunya bernama raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/ WaliKota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Tujuan Program Rastra adalah memberikan bantuan beras bersubsidi kepada keluarga kurang mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangannya dengan jumlah dan harga tertentu, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Sasaran program raskin adalah terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan masyarakat miskin yang diberhak adalah rumah tangga miskin yang telah melewati proses musyawarah di desa. Program ini secara khusus di wadahi oleh perum BULOG yang diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat agar mengurangi beban pengeluaran.

Berdasarkan Pedum Rastra peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program rastra adalah:

- a. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan umum BULOG.
- c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
- d. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- e. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
- f. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

Dalam setiap program kebijakan yang dilaksanakan pasti mempunyai hambatan dan tidak dapat berjalan dengan lancar dan pasti akan di temukan sebuah kesalahan. Hambatan dapat diketahui melalui bagaimana keefektifan pendistribusian Rastra melalui indikator keberhasilan program yaitu: Ketepatan sasaran Penerima harus pada keluarga yang memang sangat membutuhkan.

- a. Ketepatan jumlah Jumlah rastra yang di terima harus sesuai dengan keputusan

- pemerintah pusat.
- b. Ketepatan waktu dalam pendistribusian sesuai dengan yang telah di rencanakan.
- c. Ketepatan harga dibayar penerima Rastra sesuai dengan ketetapan.
- d. Ketepatan administrasi.
- e. Ketepatan kualitas yang berhubungan dengan kondisi beras yang di terima.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitin**

Penelitian ini akan dilakukan dengan tipe deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwasanya yang akan diteliti adalah mekanisme pelayanan pemerintah desa dalam pendistribusian rastra di desa Lamatti Riaja. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti ingin mengetahui gambaran kinerja pemerintah dalam pendistribusian rastra, menguraikan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya, serta dampak yang ditimbulkan akibat ketidak merataan pendistribusian rastra tersebut.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang akan di gunakan yaitu:

- a. Data primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian tersebut dilakukan yakni berupa hasil wawancara langsung dengan aparat/ staf desa dan masyarakat desa Lamatti Riaja.
- b. Data sekunder adalah data yang akan di peroleh melalui dokumen. Data sekunder akan di peroleh melalui profil Desa Lamatti Riaja dokumen tentang jumlah alokasi rastra dan pendistribusian rastra.

### **3. Tekhnik Analisa Data**

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu menganalisa data

#### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah merangkum semua data yang di peroleh dan memilih mana yang menjadi fokus penelitian sehingga akan memperoleh gambaran mengenai penelitian yang dilakukan dan membuang yang tidak perlu serta mencari yang dibutuhkan demi kejelasan pendistribusian rastra

#### **b. Penyajian data**

Penyajian data dilakukan setelah data telah di reduksi sehingga dapat di pahami jawaban dari penelitian yang dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini maka akan dapat di tarik kesimpulan yang terjadi di lapangan apakah kinerja pemerintah desa memuaskan atau tidak dan faktor yang menjadi penghambat pendistribusian Rastra di desa Lamatti Riaja.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Lamatti Riaja Dusun Cenranae merupakan desa yang berada di lingkup Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Lamatti Riaja memiliki wilayah seluas: 882 Hektar dimana desa Lamatti Riaja terdapat 5 Dusun diantaranya Mangasa, Aruhu, Hilalang, congkoe dan Cinranae. Terkhusus dusun cinranae termasuk wilayah dalam skala kecil dibanding ke-4 dusun yang lainnya.

Secara administratif desa lamatti riaja dusun cinranae terdiri dari 193 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 697 jiwa, terdiri dari 326 orang laki-laki dan 371 orang perempuan. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat di lihat dari tabel berikut ini

**Tabel 1. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian**

No.	Mata pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani	91
2	Pegawai Negeri Sipil	12
3	Pedagang	14
4	Wiraswasta	7
5	Karyawan honorer	26
6	Lain-lain	54
<b>Jumlah</b>		<b>697</b>

Sumber: Kantor desa Lamatti Riaja 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa mata pencaharian sebagai petani adalah mata pencaharian paling terbesar kemudian karyawan honorer, pedagang, PNS, wiraswasta dan lain-lain. Penduduk desa Lamatti Riaja yang bekerja adalah 150 sedangkan yang lainnya terdiri dari pelajar, anak belum bekerja, ibu rumah tangga dan sebagian kecil yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan dari tingkat SMA ke perguruan tinggi hal ini yang meningkatkan banyak penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kembali pada mata pencaharian petani dan buruh harian lepas.

### 2. Program penerima Rastra (Mekanisme pemerintah dalam mendistribusian rastra)

a. Program Beras untuk Rumah tangga tidak mampu (Rastra)

Program beras untuk rumah tangga tidak mampu (RASTRA), merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu menyediakan sebagian kebutuhan pangan pokok

keluarga tidak mampu. Melalui pelaksanaan program Rastra bersama program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Tujuan dari program RASTRA adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga tidak mampu melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras. Sasaran dari program ini adalah berkurangnya pengeluaran untuk keluarga yang tergolong miskin dengan beras bersubsidi setiap bulan dengan harga yang tergolong murah. Tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan data yang ada yaitu :

- 1) Jumlah keluarga prasejahtera: 24 keluarga
- 2) Jumlah keluarga sejahtera 1: 42 keluarga
- 3) Jumlah keluarga sejahtera 2: 87 keluarga
- 4) Jumlah keluarga sejahtera 3: 34 keluarga
- 5) Jumlah keluarga sejahtera 3 plus : 6 keluarga

b. Penyaluran program rastra

Program RASTRA di salurkan guna untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Penyaluran program RASTRA disini langsung disalurkan dari pihak satker RASTRA perum BULOG Subdirve Bulukumba selanjutnya diserahkan kepada pihak pertama yaitu Aso Surianto sebagai pelaksana distribusi rastra desa Lamatti Riaja selanjutnya diserahkan kepada pihak ke dua yakni penerima yang berhak menerima rastra. Jadi penyaluran rastra disini tidak memiliki perantara kecuali pengirim ke kantor desa.

Setelah itu diserahkan kepada penerima RASTRA yang berhak dengan syarat memiliki kartu anggota penerima RASTRA dengan uang tebusan 24.000 ribu rupiah/15 kg atau 1 karung beras BULOG. Namun banyak dari pihak penerima juga memilih untuk menyewa mobil guna untuk mengambilkan rastra di kantor desa karena “ *dengan menyewa mobil dengan memberikan upah Rp 50.000,00 RASTRA sudah termasuk biaya tebusan RASTRA sehingga kami bisa hemat ongkos pergi jadi total yang diterima dari sopir hanya Rp 2.000 dan kami tidak mengurus tenaga lagi*” tutur salah satu penerima RASTRA.

Tabel 2. Jumlah penerima raskin di desa Lamatti Riaja berdasarkan dusun

No	Nama Dusun	Jumlah Penerima RASTRA
1.	Cinranae	20 orang
2.	Aruhu	38 orang
3.	Mangasa	43 orang
4.	Hilalang	34 orang
5.	Congkoe	21 orang
<b>Jumlah</b>		<b>156 Orang</b>

Sumber: Kantor desa Lamatti Riaja 2018

Jadi jumlah penerima dari dusun cinrae termasuk dusun yang anggotanya paling sedikit menerima rastra setelah dusun Congkoe. Jadi penerima rastra di Dusun Cinrae belum merata dari 34 kepala keluarga sejahtera 3 dan 6 kepala keluarga sejahtera 3 plus. Jadi hanya 51 dari 100%.

### **3. Peran Pemerintah dalam menangani faktor penghambat program Rastra**

Efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera di Kecamatan Ranoyapo di uraikan berdasarkan kriteria-kriteria efektivitas berikut ini:

#### **a. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bulupoddo Desa Lamatti Riaja, sejauh ini belum terlalu baik karena tujuan sebenarnya selalu melenceng. Program beras sejahtera ini kurang sepenuhnya membantu masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran perbulannya. Kendala yang dialami masyarakat yaitu waktu selalu terlambat dalam penyaluran beras ini serta sasaran dari penerima manfaat ini belum ditindak lanjuti oleh pemerintah yang seharusnya tegas dalam mendata keluarga yang berhak mendapatkannya.

#### **b. Integrasi**

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sampai saat ini jika dilihat dalam penelitian, pemerintah dan masyarakat kurang bekerja sama dalam pelaksanaan program beras sejahtera. Pemerintah kurang memberikan informasi mengenai program ini kepada masyarakat.

#### **c. Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam program beras sejahtera kurang baik. Para petugas yang sudah dipercayakan untuk mengukur beras bisa dibilang tidak adil. Jadi pemerintah harus sebenarnya memberikan beras yang lebih sesuai dengan aturan yang ada. Tingkat keberhasilan yang dapat dicapai pemerintah yaitu ketika masyarakat merasa sejahtera.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan:

- a. Pencapaian Tujuan, Pencapaian tujuan di Kecamatan Bulupoddo Desa Lamatti Riaja Kab. Sinjai belum tercapai disebabkan di beberapa desa pemerintah tidak mampu memberdayakan masyarakat dengan maksimal serta kualitas beras yang masih kurang pun mengakibatkan tidak efektifnya program beras sejahtera sehingga pelayanan kepada masyarakat masih kurang.
- b. Integrasi yang ada di Kecamatan Bulupoddo Desa Lamatti Riaja Kab. Sinjai kurang baik, karena pemerintah tidak mampu untuk memberikan informasi yang baru kepada masyarakat tentang program ini juga pemerintah kurang menyesuaikan perubahan data yang ada.
- c. Adaptasi Pemerintah harus mengadakan kerjasama dan lebih teliti. Pemerintah tidak mampu melaksanakan program dengan sebaik mungkin karena masyarakat masih melihat tindakan penyelewengan yang dilakukan aparat pemerintah setempat yang ada.

### 2. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

- a. Pemerintah khususnya menteri sosial wajib meninjau kembali BULOG secara khusus mengenai kualitas beras yang disalurkan agar benar-benar tujuannya terlaksana demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus lebih bekerja sama dengan setiap kepala lingkungan, hendaknya memberikan informasi yang baik kepada masyarakat agar supaya masyarakat dapat mengetahui maksud dari program ini.
- b. Pemerintah diharapkan melakukan Pendataan kembali dan mengawasi dengan baik pendistribusian kepada RTS-PM juga hendaknya pemerintah desa selalu membuat sosialisasi kepada semua masyarakat mengenai aturan yang dibuat agar supaya dalam membangun dan memberdayakan program masyarakat boleh menjadi lebih efisien lagi.
- c. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dengan sebaik mungkin agar supaya tidak terdapat penyalahgunaan, dan juga agar supaya beras sejahtera yang ada memang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat boleh merasa puas dengan beras sejahtera yang ada dan pemerintah harus sebenarnya memberikan beras yang lebih sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan:

## DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.

- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009.
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Grafindo Persada.
- <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-rastra/>
- <http://www.jurnalsocialsecurity.com/sosial/kebijakan-nasional-program-rastra.html>
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumardi Suryabrata. 1998. *Metodolog Penelitian*. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan. 2005. *Management Publik*. Jakarta: Gramedia Widja Sarana Indonesia.
- SK Keputusan Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor 17/2016 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota Sesulawesi Selatan 2016.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.
- Keputusan Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2015.